



RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BATANG
JL. RA. KARTINI NO. 1 BATANG 51215 TELP. (0285) 391428

KATA PENGANTAR

Atas limpahan rahmat dan hidayah Nya kepada kita semua sehingga Penyusunan Rancangan Kerja (Renja) Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dispermades Kabupaten Batang tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang Rancangan Kerja Dispermades Kabupaten Batang yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD serta Tujuan dan Sasaran Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Renja ini.

Kami berharap semoga Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2025 ini dapat nantinya memberikan gambaran dan kontribusi terhadap Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2025

Batang, 8 Juli 2024

Kepala Dispermades
Kabupaten Batang,



Drs. RUSMANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730720 199303 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT (RENJA PD)

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Daerah sampai dengan Tahun 2023. 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 19

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispermades Kabupaten Batang..... 23

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD. 24

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 36

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 56

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah (PD) Dispermades Kabupaten Batang 64

3.3 Program dan Kegiatan Dispermades Kabupaten Batang Tahun2024 70

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPERMADES

BAB IV PENUTUP. 46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 mengacu pada perencanaan nasional dan provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja, tetapi juga kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen perencanaan Pembangunan Lima Tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani RPJMD, sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Tahun 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Batang dipimpin oleh Penjabat Bupati Batang sejak bulan Mei 2024, dimana sebagai pedoman Penjabat Bupati untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tahun 2023-2026 maka telah disusun Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 dan telah ditetapkan dalam PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023-2026. Hal ini sebagai pelaksanaan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 yaitu bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah karena masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau 2023 maka dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD diinstruksikan khususnya kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 di atas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah perangkat daerah yang disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja (Renja) periode 2023-2026.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Tata cara penyusunan Renja sebagaimana Permendagri 86/2017 adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja (pasal 125) , meliputi :
 - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan

- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD (Pasal 126-130), meliputi :

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja pada minggu pertama bulan Desember yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan Renja PD (Pasal 131-135) :
 - a. Penyusunan Rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD setelah dilakukan review oleh Tim RKPD
 - b. Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD
 - c. Rancangan Renja PD disampaikan kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja PD disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Pasal 136-137)

Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA. Forum tersebut dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (Pasal 138)

Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah (Pasal 139-143)
 - a. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi
 - b. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan
 - c. BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris

Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

- d. Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.
- e. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Berdasarkan tata cara penyusunan Renja di atas , dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja (Renja) Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2024 yang disusun ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2024 dan selanjutnya Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKAPD) akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 6 Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 tahun 2007 tentang Tata Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Batang tahun 2007 Nomor 13 seri E nomor 7);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 (Lembaran daerah Kabupaten Batang tahun 2019 Nomor 13);
- n. Peraturan Bupati Batang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Batang tahun 2021 Nomor 115);
- o. Peraturan Bupati Batang Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 12);
- p. Peraturan Bupati Batang Batang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 16);

- q. Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 36).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2025 adalah :

- a. Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan, terutama yang diampu oleh Dispermades Kabupaten Batang;
- b. Terciptanya efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, khususnya yang dilaksanakan oleh Dispermades Kabupaten Batang.
- c. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dispermades Kabupaten Batang pada tahun anggaran 2025.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2025 adalah :

- a. Memberikan informasi yang komprehensif tentang rencana program, dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2025;
- b. Menyediakan dokumen acuan yang pasti bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2025;
- c. Menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2025.
- d. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang efektif dan efisien.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Tahun 2025

1.1 Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (Renja) Dispermades tahun 2025, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen perangkat daerah, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.4 Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dispermades Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2023.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dispermades Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dispermades Tahun 2023

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan tahun 2023 dan Capaian Renstra Dispermades sampai dengan tahun 2023.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dispermades

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan indikator kerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang.

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Dampaknya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

5. Formulasi dan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan..
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Batang
Bagian ini menguraikan proses perbandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan :

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang.
Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang.
- 3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan sesuai yang tertuang dalam usulan Renstra 2023-2026.

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dispermades Sampai dengan Tahun 2023

Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dispermades Kabupaten Batang guna mengidentifikasi apakah pelaksanaan

pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya.

Penyusunan Renja Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta bidang pelaksana.

Penyusunan Renja Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2024 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
- c. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Keberhasilan suatu proses perencanaan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra PD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Dispermades Kabupaten Batang yang ditunjang dengan Anggaran. Total Pagu Anggaran Belanja APBD Tahun 2023 Dispermades Kabupaten Batang sebagai berikut: Pagu anggaran Belanja sebesar Rp. 41.751.060.497 terealisasi sebesar Rp. 41.236.328.054 atau sebesar 98,77 % dengan jumlah program pada DPPA sebanyak 4 Program, 9 Kegiatan dengan 29 Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah program dan kegiatan pada Renstra 2017 – 2022 adalah sebanyak 13 program , 67 kegiatan, pada Renja tahun 2022 adalah sebanyak 3 program , 7 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan karena adanya perubahan peraturan yang baru Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sehingga program dan kegiatan yang ada pada Renstra namun tidak terakomodir dalam DPA.

Realisasi keuangan dan capaian kinerja fisik kegiatan Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.a
Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Fisik
Dispermades Kabupaten Batang
Tahun 2023

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		%	Kinerja Fisik			Ket.
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	Satuan	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.357.184.6	3.219.533.60	95,90	12 bulan	12 bulan	100	
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.335.000	4.334.000	99,98	4 Laporan	4 Laporan	100	
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.335.000	4.334.000	99,98	4 Laporan	4 Laporan	100	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.473.957.141	2.408.164.326	97,34	12 bulan	12 bulan	100	
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2.421.254.591	2.355.527.276	97,29	12 bulan	12 bulan	100	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.702.550	52.637.050	99,88	12 bulan	12 bulan	100	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.950.000	35.949.310	71,97	21 Org	21 Org	100	
	a. Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	49.950.000	35.949.310	71,97	21 Org	21 Org	100	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.714.961	129.313.000	86,95	12 bulan	12 bulan	100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.473.700	2.440.300	98,65	12 bulan	12 bulan	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.171.000	58.784.000	84,98	10 Unit	10 Unit	100	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.634.000	2.884.000	51,19	12 bulan	12 bulan	100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.061.400	10.061.200	100,00	12 bulan	12 bulan	100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	2.411.000	66,97	3 Exemplar	3 Exemplar	100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.774.861	52.732.500	91,27	12 bulan	12 bulan	100	
1.5	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	444.496.000	429.000.000	96,51	12 Bulan	12 Bulan	100	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	444.496.000	429.000.000	96,51	2 Unit	2 Unit	100	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.941.500	131.381.748	93,88	12 bulan	12 bulan	100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00	12 bulan	12 bulan	100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.900.000	54.623.540	96,00	12 bulan	12 bulan	100	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.041.500	75.758.208	92,34	12 bulan	12 bulan	100	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.790.000	81.391.225	84,97	25 Uunit	25 Uunit	100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.790.000	55.663.450	83,34	25 Unit	25 Unit	100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000	8.730.000	97,00	12 bulan	12 bulan	100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	20.000.000	16.997.775	84,99	1 Unit	1 Unit	100	
2	Program Penyelenggaraan Penataan Desa	55.500.000	55.397.800	99,82	25 Desa	25 Desa	100	

2.1	a. Penyelenggaraan Penataan Desa	55.500.000	55.397.800	99,82	25 Desa	25 Desa	100	
	b. Fasilitas Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	55.500.000	55.397.800	99,82	25 Desa	25 Desa	100	
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	35.217.060.345	34.871.897.368	99,02	239 Desa	239 Desa	100	
3.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	35.217.060.345	34.871.897.368	99,02	50 Desa	50 Desa	100	
	a. Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	88.816.000	87.495.450	98,51	239 Desa	239 Desa	100	
	b. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	3.472.469.150	3.011.121.940	86,71	239 Desa	239 Desa	100	
	c. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	30.549.000	26.067.550	85,33	239 Desa	239 Desa	100	
	d. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.	234.450.000	233.384.000	99,55	239 Desa	239 Desa	100	
	e. Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	40.499.800	31.074.800	76,73	239 Desa	239 Desa	100	
	f. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	51.260.800	51.244.800	99,97	239 Desa	239 Desa	100	
	g. Pelaksanaan Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	31.259.502.695	31.047.307.179	99,32	239 Desa	239 Desa	100	
	h. Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa & Kelurahan	39.512.900	39.462.900	99,87	239 Desa	239 Desa	100	
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	3.121.315.550	3.089.499.277	98,98	239 Desa	239 Desa	100	

4.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat ukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah kabupaten/Kota	3.121.315.550	3.089.499.277	98,98	239 Desa	239 Desa	100	
	a. B. Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	508.414.550	508.197.402	99,96	239 Desa	239 Desa	100	
	b. Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	280.792.400	280.740.817	99,98	239 Desa	239 Desa	100	
	c. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1.795.640.600	1.788.904.800	99,62	239 Desa	239 Desa	100	
	d. Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100.468.00	81.138.400	80,76	15 Kecamatan	15 Kecamatan	100	
	e. Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	436.000.000	430.517.858	98,74	15 Kecamatan	15 Kecamatan	100	
	JUMLAH	41.751.060.497	41.236.328.054	98,77				

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dispermades Kabupaten Batang tahun 2022 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dispermades Kabupaten Batang dapat dilihat pada tabel **2.1.b. (T-C 29)** di bawah ini :

Tabel 2.1.b T.C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2023

Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s.d. Tahun n-3 (s.d Tahun 2022)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2024)	
							Target Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10=5+7+9	11=10/4
1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA								
1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		95	86	90	90	100	95	
2	13	01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah.	persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	95	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	95 %	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	5 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	Laporan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Desa								
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	21 Orang/Bln	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 Dokumen	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

				a. Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	21 Org	21 Org	21 Org	100	35 Orang		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran								
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan yang tersedia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	1 Paket		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 bulan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100	3 Paket		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makanan dan minuman yang tersedia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 Paket		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 Paket		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 Dok	3 Exemplar	3 Exemplar	3 Exemplar	100	12 Dokumen		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terfasilitasi	12 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 Laporan		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercukupinya urusan jasa pelayanan								
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 Laporan		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 Laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 Laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24 Unit	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	24 Unit		

					yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	20 Unit	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	3 Unit	
					Program Penataan Desa	Persentase budaya desa yang dilestarikan	80 %	NA	25 %	25 %	100	40 %	
					Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah adat dan budaya desa yang dibina	40 Desa	NA	25 Desa	25 Desa	100	40 Desa	
					Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat & Desa Adat Kewenang an Kabupaten /Kota	1 Laporan	NA	25 Desa	25 Desa	100	1 Laporan	
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	persentase desa yang tertib administrasi sesuai peraturan yang berlaku	56,49 %	43,93	46,03	46,03	100	46,03 %	
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya	239 desa	239 desa	50 Desa	50 Desa	100	239 desa	
					Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2 Dokumen	239 desa	239 Desa	239 Desa	100	2 Dokumen	
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	jumlah Dokumen Hasil fasilitasi pengelolaan desa	4 Dokumen	239 desa	239 Desa	239 Desa	100	4 Dokumen	
					Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	239 desa	239 Desa	239 Desa	100	3 Dokumen	
					Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	239 desa	239 Desa	239 Desa	100	1 Laporan	
					Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	239 desa	239 Desa	239 Desa	100	1 Laporan	

				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	239 desa	239 Desa	239 Desa	100	1 Dokumen		
				Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	4 Dokumen	239 desa	239 Desa	239 Desa	100	4 Dokumen		
				Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	239 desa	239 Desa	239 Desa	100	2 Dokumen		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa	80 %	60 %	65	65	100	70 %		
				<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah LKD yang aktif dalam pemberdayaan desa	70 desa	239 desa	239 Desa	239 Desa	100	70 desa		
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Dokumen	2 Desa	239 Desa	239 Desa	100	5 Dokumen		
				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Ada	5 Unit	2 Kali	239 Desa	239 Desa	100	5 Unit		

				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dokumen	12 Kelompok	239 Desa	239 Desa	100	5 Dokumen		
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	2 kelompok	15 Kecamatan	15 Kecamatan	100	5 Laporan		
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	4 Pokja 1 Sekretariat	15 Kecamatan	15 Kecamatan	100	12 Dokumen		

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa realisasi program/kegiatan hampir semua target terpenuhi, hal ini didukung adanya komitmen bersama untuk senantiasa meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan di Dispermades agar tercapai pelayanan yang terus meningkat tiap tahun.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dispermades Kabupaten Batang sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas
2. Belum optimalnya penerapan SOP dalam pelayanan
3. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana penunjang kinerja Aparatur

Dari identifikasi terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dispermades Kabupaten Batang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tersebut di atas, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dispermades Kabupaten Batang Realisasi Capaian Tahun 2022 , dari 7 (tujuh) indikator, seluruhnya telah memenuhi target tahun 2021, antara lain: Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sejumlah 6 kelompok, Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK sebesar 68%, LPM Berprestasi sebesar 41 %, PKK aktif dan Posyandu aktif keduanya berhasil mencapai target sebesar 100%, Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat sebesar 10 %, dan kapasitas aparatur pemerintah desa sebesar 70 %.

Dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Batang terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga Kemasyarakatan tingkat desa, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dispermades meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas aparatur Dispermades melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Pemantapan sistem pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa/kelurahan dan daerah;
3. Pengembangan manajemen pembangunan partisipatif melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di setiap level pemerintahan secara berjenjang dari bawah ke atas;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Untuk lebih jelasnya, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dispermades Kabupaten Batang Realisasi Capaian Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Capaian kinerja pelayanan Dispermades Daerah Kabupaten Batang tahun 2023 dapat diketahui dari indikator- indikator pada Tabel 2.2 (TC-30) di bawah ini :

Tabel 2.2 (TC-30)
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dispermades Kabupaten Batang
Tahun 2023

Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	0,53	0,54	0,56	0,57	0,57	0,55			
Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks	0,71	0,76	0,78	0,81	0,81	0,77			
Indeks Ketahanan Ekologi	Indeks	0,45	0,46	0,48	0,51	0,51	0,46			
Persentase PKK Aktif	%	25,1	37,66	50,21	62,76	25,10	50,37			
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Scor/ Nilai	65	66	67	68	65	74,8			

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Selanjutnya gambaran keberhasilan Dispermades Kabupaten Batang dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2023 tampak pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.a.
Analisis Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan social ekonomi dan ekologi masyarakat	Indeks Ketahanan Sosial	0,54	0,55	100 %
		Indeks Ketahanan Ekonomi	0,76	0,77	100 %
		Indeks Ketahanan Ekologi	0,46	0,46	100%
2	Meningkatkan Peran dan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	Persentase PKK Aktif	37,66	50,37	100 %
3	Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66	74,8	100 %

Berdasarkan tabel di atas, secara kumulatif rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis Dispermades Kabupaten Batang berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 adalah sebesar 100 % Indikator kinerja yang mencapai target maupun yang melebihi target ada 3 yakni Indikator Indeks Ketahanan Sosial, indikator Indeks Ketahanan Ekologi, indikator Indeks Ketahanan Lingkungan Ekologi , indikator Prosentase PKK Aktif dan indikator nilai Sakip.

1. Indikator 1 : Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi

Realisasi kinerja indikator 2 Sasaran 1 yaitu a. Indikator Ketahanan Sosial sebesar 0,55 % , b. Indikator Ketahanan Ekonomi sebesar 0,77 % dan Indeks

Ketahanan Ekologi sebesar 0,46 % diperoleh dari hasil penghitungan berdasarkan IDM Kementrian.

Berdasarkan realisasi indikator 2 dari sasaran 1 yang terdiri dari 3 indeks ketahanan pada tahun 2023 adalah a. Indikator Ketahanan Sosial sebesar 0,55 % , b. Indikator Ketahanan Ekonomi sebesar 0,77 % dan Indeks Ketahanan Ekologi sebesar 0,46 %, **sedangkan pada tahun 2022 realisasi kinerjanya** a. Indikator Ketahanan Sosial sebesar 0,53 % , b. Indikator Ketahanan Ekonomi sebesar 0,71 % dan Indeks Ketahanan Ekologi sebesar 0,43 % . Dapat disimpulkan bahwa a. Indikator Ketahanan Sosial mengalami kenaikan sebesar 0,02 % , b. Indikator Ketahanan Ekonomi mengalami kenaikan sebesar 0,06 % dan Indeks Ketahanan Ekologi mengalami kenaikan sebesar 0,03 % realisasi kinerja dibandingkan dengan tahun 2022 .

Tahun 2023 merupakan tahun ke 1 dari RPJMD/RPD/Renstra Dispermades Kabupaten Batang. Realisasi kinerja pada indikator 2 sasaran 1 adalah a. Indikator Ketahanan Sosial sebesar 0,53 % , b. Indikator Ketahanan Ekonomi sebesar 0,71 % dan Indeks Ketahanan Ekologi sebesar 0,43 % dengan persentase capaian 100% lebih. Apabila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD/RPD/Renstra tahun 2026 a. Indikator Ketahanan Sosial capaian kinerjanya sebesar 91 % ($0,53 : 0,58 \times 100$) , b. Indikator Ketahanan Ekonomi capaian kinerjanya sebesar 84,52% ($0,71 : 0,84 \times 100$) dan Indeks Ketahanan Ekologi capaian kinerjanya sebesar 81,8 % ($0,45 : 0,55 \times 100$).

2. Indikator Persentase PKK Aktif

Realisasi kinerja indikator ini sebesar 50,30 % diperoleh dari hasil penghitungan:

$$\begin{aligned} \text{Persentase PKK Aktif} &: \frac{\text{Jumlah PKK Aktif}}{\text{jumlah PKK se Kab.Batang}} \times 100 \\ &: (133 : 264 \times 100 = 50,37 \%) \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 3.3, realisasi indikator 1 pada sasaran 2 tahun 2023 adalah sebesar 50,37 %, sedangkan pada tahun 2022 realisasi kinerjanya sebesar 25,10 % Dapat disimpulkan bahwa indikator 1 mengalami kenaikan realisasi kinerja dibandingkan dengan tahun 2022 dengan kenaikan sebesar 25,27 % .

Tahun 2023 merupakan tahun ke 1 dari RPJMD/RPD/Renstra Dispermades Kabupaten Batang. Realisasi kinerja indikator 1 pada sasaran 2 adalah sebesar 50,37 % dengan persentase capaian 133 %. Apabila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD/RPD/Renstra tahun 2026 sebesar 75,31% maka capaian kinerjanya sebesar 66,79 %.

3. Indikator Nilai Sakip

Realisasi kinerja indikator 1 sasaran 3 sebesar 74,80 % diperoleh dari hasil penghitungan nilai sakip Dispermades.

Berdasarkan tabel 3.3, realisasi indikator 1 pada sasaran 3 tahun 2023 adalah sebesar 74,80%, sedangkan pada tahun 2022 realisasi kinerjanya sebesar 72,81 % Dapat disimpulkan bahwa indikator 1 mengalami kenaikan realisasi kinerja dibandingkan dengan tahun 2022 dengan kenaikan sebesar 1,99 % Tahun 2023 merupakan tahun ke 1 dari RPJMD/RPD/Renstra Dispermades Kabupaten Batang. Realisasi kinerja indikator 1 pada sasaran 3 adalah sebesar 74,80 % dengan persentase capaian 100 %. Apabila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD/RPD/Renstra tahun 2026 sebesar 69 % maka capaian kinerjanya sebesar 108 %.

Analisis atas realisasi dan capaian setiap indikator kinerja bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala yang ditemui, sehingga dapat diupayakan langkah-langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai target sasaran tahun berikutnya. Analisis dilakukan dengan menganalisa atas performance gap yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispermades

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta untuk meraih tujuan organisasi, Dispermades Kabupaten Batang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, baik faktor internal maupun eksternal. Dengan melakukan analisis terhadap lingkungan, dalam hal ini menggunakan analisis SWOT, maka dapat diketahui bahwa faktor lingkungan internal meliputi:

Strenght (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan), sedangkan faktor lingkungan eksternal meliputi: *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (tantangan/kendala).

Melalui metode analisis SWOT, yakni memperhitungkan *Strenght* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (tantangan/kendala), Dispermades Kabupaten Batang telah mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factors*) serta faktor-faktor yang dapat menghambat dalam pencapaian tujuan organisasi, baik faktor internal maupun faktor eksternal dalam perencanaan strategis yaitu:

Tabel 2.4
Analisis SWOT
Dispermades Kabupaten Batang

<i>Strenght</i> (kekuatan)	<i>Opportunity</i> (peluang)
- Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten	- Tahapan perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan partisipasi masyarakat dari mulai tingkat desa (Musrenbangdes)
- Tersedianya anggaran (APBD) untuk pelaksanaan program/kegiatan	- Tersedianya tenaga ahli dan pendamping desa yang kompeten
- Adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan	- Tersedianya program aplikasi computer yang dapat mempermudah pelaksanaan tugas (misal: siskeudes)
- Adanya komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa serta peningkatan kapasitas perangkat desa	- Adanya kebijakan Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan program prioritas pembangunan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa serta peningkatan kapasitas perangkat desa
- Adanya pemimpin yang berintegritas dan memahami tugas dan fungsi Dispermades	- Adanya dana bantuan dari pusat dan provinsi (misal: Dana Desa dan DID) untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa serta peningkatan kapasitas perangkat desa
	- Adanya tuntutan dari masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Weakness (kelemahan)	Threat (kendala)
- Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai	- Tahapan perencanaan pembangunan yang kurang sinkron di tingkat desa dan tingkat daerah/kabupaten
- Masih berorientasi pada penyerapan anggaran (SPJ)	- Masih rendahnya kompetensi/ kapasitas/ kualitas SDM (perangkat desa) sehingga kesulitan dalam mengoperasikan program aplikasi computer dan pelaksanaan administrasi
- Belum adanya system informasi (data base)	- Banyaknya sarana dan prasarana desa yang rusak dan kurang memadai
- Kurangnya SDM yang menguasai program aplikasi computer	- Masih tingginya angka kemiskinan di desa
- Kurangnya anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM	- Masih banyaknya penyimpangan yang terjadi di desa karena kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap aturan
	- Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) belum optimal
	- Kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif (UEP dan BUMDes) di desa

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Selama kurun waktu 2023, faktor lingkungan internal yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dispermades Kabupaten Batang adalah adanya komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa serta peningkatan kapasitas perangkat desa, sedangkan faktor lingkungan eksternal yang dominan adalah adanya dana bantuan dari pusat dan provinsi (misal: Dana Desa, DID, Bantuan Keuangan) untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa serta peningkatan kapasitas perangkat desa.

Namun demikian, isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi Dispermades Kabupaten Batang diantaranya:

- Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan belum optimal;
- Masih rendahnya kompetensi/ kapasitas/ kualitas SDM (perangkat desa);
- Kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif (UEP dan BUMDes) di desa.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagai perwujudan dari tindak lanjut beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dispermades Kabupaten Batang, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Penyusunan RKPD Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026. Tabel Review rancangan Rencana Kerja Dispermades Kabupaten Batang terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dapat kami sajikan dalam **Tabel 2.4 (TC-31)** berikut :

Tabel 2.4 (TC-31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Batang

Nama Perangkat: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				27.025.508.405,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				27.025.508.405,00	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Batang	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan cepat	12.bulan	3.333.829.042,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Batang	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan cepat	12.0 bulan	3.333.829.042,00	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kab. Batang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Capaian kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD		14.994.000,00	<i>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kab. Batang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Capaian kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	14.994.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Evaluasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Batang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Capaian kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	14.994.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Evaluasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Batang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Capaian kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	14.994.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Batang	Tertib administrasi dan pelaporan keuangan	12.bulan	2.961.821.435,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Batang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/ bulan	2.961.821.435,00	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Batang	Jumlah Orang Yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Org/.Bln	2.888.459.885,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Batang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/ Bulan	2.888.459.885,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12. Dokumen	73.361.550,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	73.361.550,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Batang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	25.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Batang	Terwujudnya Tertib Pegawai yang sesuai dengan tupoksinya	22 Orang/ bln	25.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Kab. Batang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	25.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Kab. Batang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Oran/b lng	25.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Batang	Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran	12. bulan	103.043.407,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Batang	Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran	12 bulan	103.043.407,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Batang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	2.124.700,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Batang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	2.124.700,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Batang	Jumlah Paket Peralatan dan peerengkapan Kantor	5 Paket	29.842.307,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	5 Paket	29.842.307,00	
	Penyediaan Bahan Logistik	Kab. Batang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	12 Paket	7.984.000,00	Penyediaan Bahan Logistik	Kab. Batang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	12 Paket	9.444.000,00	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Batang	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan	12 Paket	9.492.400,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Batang	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan	12 Paket	9.492.400,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Batang	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	3.600.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Batang	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	3.600.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Batang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. Batang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	50.000.000,00	
					133.970.200,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			12.bulan	133.970.200,00	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Batang	Cakupan layanan operasional kantor	12.bulan		Pemerintah Daerah Kantor	Kab. Batang	Cakupan layanan operasional kantor			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Batang	Jumlah Laporan Penyediaan surat menyurat terlaksana	100 Laporan	2.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Batang	Jumlah Laporan Penyediaan surat menyurat terlaksana	100 Laporan	2.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Batang	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	49.800.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Batang	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	49.800.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Batang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	82.170.200,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	82.170.200,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Batang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	24 Unit	95.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Batang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	24 Unit	95.000.000,00	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Batang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tugas	24 Unit	65.000.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional Lapangan	Kab. Batang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tugas	24 Unit	65.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Batang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	35 Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Batang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	35 Unit	5.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Batang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	3. unit	25.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Batang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	3. unit	25.000.000,00	
2.	PROGRAM PENATAN DESA	Kab. Batang	Persentase budaya desa yang dilestarikan	239 Desa	35.000.000,00	PROGRAM PENATAN DESA	Kab. Batang	Persentase budaya desa yang dilestarikan	239 Desa	35.000.000,00	
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab. Batang	jumlah adat dan budaya desa yang dibina	15 Laporan	35.000.000,00	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab. Batang	jumlah adat dan budaya desa yang dibina	15 Laporan	35.000.000,00	
	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batang	Laporan Jumlah Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Laporan	35.000.000,00	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batang	Laporan Jumlah Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Laporan	35.000.000,00	

3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab. Batang	persentase desa yang tertib administrasi sesuai peraturan yang berlaku	46,03 %	20.309.592.800,00	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab. Batang	persentase desa yang tertib administrasi sesuai peraturan yang berlaku	46,03%	20.309.592.800,00	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasa Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Batang	jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya		20.309.592.800,00	Pembinaan dan Pengawasa Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Batang	jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya		20.309.592.800,00	
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Batang	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	239 Dokumen	65.000.000,00	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Batang	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	239 Dokumen	65.000.000,00	
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Batang	Jumlah Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	239 Dokumen	3.486.584.800,00	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Des	239 Dokumen	3.487.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pembinaan Dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Batang	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan Dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	15 Dokumen	50.000.000,00	Pembinaan Dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Batang	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan Dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	15 Dokumen	50.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penyelenggaran Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Batang	Jumlah Laporan Hasil Penyeleng garaan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	204 Laporan	40.000.000,00	Penyelenggaran Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Batang	Jumlah Laporan Hasil Penyeleng garaan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	204 Laporan	40.000.000,00	
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Batang	Jumlah Laporan Hasil Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	200 Laporan	35.000.000,00	Fasilitas Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Batang	Jumlah Laporan Hasil Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	200 Laporan	35.000.000,00	
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	239 Dokumen	25.000.000,00	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	239 Dokumen	25.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Penugasan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	239 Dokumen	16.558.008.000,00	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Penugasan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	239 Dokumen	16.558.008.000,00	
	Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa Dan Kelurahan	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa	6 Dokumen	50.000.000,00	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa Dan Kelurahan	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa	6 Dokumen	50.000.000,00	

			serta Lomba Desa Dan Kelurahan					serta Lomba Desa Dan Kelurahan			
4.	PROGRAM PEMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab. Batang		70 %	3.347.086.563,00	PROGRAM PEMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab. Batang	jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan asetnya	70 %	3.347.086.563,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Batang	Jumlah LKD yang aktif dalam pemberdayaan desa	70 desa	3.347.086.563,00	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Batang	Jumlah LKD yang aktif dalam pemberdayaan desa	70 Desa	3.347.086.563,00	
	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Pemberdayaan dan Pendayaagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan DESA /Kelurahan 9RT,RW,PKK, Posyandu,LPK dan KarangTaruna) Lembaga Adat Desa Kelurahan Dan MAsyarakat Hukum Adat	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan RT,RW,PKK, Posyandu,LPK dan KarangTaruna) Lembaga Adat Desa Kelurahan Dan MAsyarakat Hukum Adat	239 Dokumen	580.815.113,00	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Pemberdayaan dan Pendayaagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan DESA /Kelurahan 9RT,RW,PKK, Posyandu,LPK dan KarangTaruna) Lembaga Adat Desa Kelurahan Dan MAsyarakat Hukum Adat	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Pemberdayaan dan Pendayaagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan RT,RW,PKK, Posyandu,LPK dan KarangTaruna) Lembaga Adat Desa Kelurahan Dan MAsyarakat Hukum Adat	239 Dokumen	580.815.113,00	
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Kab. Batang	Jumlah Penyediaan Sarana & Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	239 Unit	149.999.900,00	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Kab. Batang	Jumlah Penyediaan Sarana & Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	239 Unit	149.999.900,00	

	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, TMMD,UPK	Kab. Batang	Jumlah dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan UKM dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	4 Dokumen	2.095.000.000,00	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa TMMD, UPK	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan UKM dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	4 Dokumen	2.095.000.000,00	
	Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Batang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	239 Laporan	121.271.500,00	Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Batang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	239 Laporan	121.271.500,00	
	Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Hasil fasilitas Tim Penggerak PKK dlm Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	239 Dokumen	400.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Hasil fasilitas Tim Penggerak PKK dlm Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	239 Dokumen	400.000.000	
			TOTAL PAGU INDIKATIF		27.025.508.405,00			TOTAL PAGU INDIKATIF		27.025.508.405,00	

Reviu terhadap rancangan akhir RKPD dilakukan melalui identifikasi program atau kegiatan prioritas yang tercantum didalam rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan . Hasil reviu dapat dilihat pada tabel 2.4 dan dapat dianalisis sebagai berikut

1. Terdapat perubahan pagu indikatif dibandingkan dengan Pagu APBD Tahun 2024 dari beberapa sub kegiatan sesuai evaluasi pelaksanaan sub kegiatan tahun sebelumnya dan penyesuaian terhadap Standarisasi Harga Satuan Tahun 2025.
2. Pagu indikatif diutamakan untuk program dan kegiatan prioritas sesuai dengan isu-isu strategis pelaksanaan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dispermades sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan membantu Bupati Batang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dituntut untuk meningkatkan peran kelembagaan masyarakat, partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan juga swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain: 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dispermades Kabupaten Batang sebagai Perangkat Daerah (PD) yang melayani lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang selalu berupaya maksimal untuk mengusulkan program-program dan kegiatan yang mendukung peningkatan pelayanan masyarakat dan Desa. Usulan ini disampaikan melalui forum Perangkat Daerah (PD) pada proses perencanaan pembangunan daerah, yang difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten Batang. Pada penyusunan RKPD 2025 ini, tidak terdapat Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat maupun dari Para Pemangku Kepentingan.

Tabel. 2.5 (T-C.3.2)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Dispermades Kab. Batang
Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pencapaian visi dan misi RPJP Nasional 2025 dengan prioritas agenda pembangunan difokuskan pada pemantapan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan penekanan pada upaya : 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 2. Perkembangan kemampuan ilmu dan teknologi; dan 3. Penguatan daya saing perekonomian. Visi nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.

Didalam pelaksanaan Penyusunan Renja Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2025, telah mengikuti hasil sinkronisasi terhadap program prioritas nasional sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMD 2021 – 2026. Sesuai dengan tupoksi Dispermades. Sesuai dengan tupoksi Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan Dispermades Kabupaten Batang diselaraskan dengan tujuan nasional untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain melalui program peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat, pemantapan kehidupan dan sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan TTG dalam peningkatan pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan dan emantapan penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan. Disamping itu, program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan perlu mendapat perhatian lebih, seperti koordinasi dan perencanaan program dan lain sebagainya yang pada akhirnya ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor). Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan Perangkat Daerah. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai

Dispermades Kabupaten Batang sebagai unsur penunjang pemerintahan yang melaksanakan tugas dan fungsi Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 di bawah ini :

1. Tujuan

- a. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan akuntabel.

2. Sasaran :

- a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran .
- b. Meningkatnya Efektifitas dan Efisien Kinerja dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Selaras dengan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 di atas, maka Dispermades Kabupaten Batang menetapkan Tujuan Strategis Jangka Menengah yaitu

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)

Dalam rangka mencapai Tujuan Strategis Jangka Menengah di atas, Dispermades Kabupaten Batang telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan social ekonomi dan ekologi masyarakat
- b. Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Dispermades.

Tabel 3.2.a.
Tujuan dan Sasaran Strategis
Dispermades Kabupaten Batang

No	Tujuan RPD Tahun 2023-2026	Sasaran RPD Tahun 2023-2026	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-			
						2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel	1. Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunkannya angka kemiskinan dan pengangguran	1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan social ekonomi dan ekologi masyarakat	Persentase Desa Maju dan Mandiri	22	23	24	25
					Indeks Ketahanan Sosial	0,54	0,56	0,57	0,58
					Indeks Ketahanan Ekonomi	0,76	0,78	0,81	0,84
					Indeks Ketahanan Ekologi	0,46	0,48	0,51	0,55
		2. Meningkatnya Efektifitas dan Efisien Kinerja dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)	2. Meningkatkan Peran dan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	Persentase PKK aktif	37,66	50,21	62,76	75,31
				3. Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	89	90	90
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66	67	68	69

3.1 Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan OPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu:

- 1. Pencapaian SDGs
- 2. Pengentasan kemiskinan
- 3. Pencapaian NSPK dan SPM
- 4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Penetapan Anggaran Tahun 2025 merencanakan 4 program yang terdiri : 9 kegiatan 29 sub kegiatan. Program yang dilaksanakan terdiri dari 1 program, 6 kegiatan, dan 15 sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten serta 3 program, 3 kegiatan, dan 14 sub kegiatan yang merupakan urusan yang merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang. Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Dispermades Kabupaten Batang
Tahun Anggaran 2025

Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1.	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	a.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
		2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	a.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
				b.	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4.	Administrasi umum perangkat daerah	a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
				b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				c.	Penyediaan bahan logistic kantor
				d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

				e.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
				f.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		5.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	a.	Penyediaan jasa surat menyurat
				b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
				c.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
		6.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				b.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
				c.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2.	Program Penataan Desa	1.	Penyelenggaraan Penataan Desa	a.	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	a.	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
				b.	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
				c.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
				d.	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa
				e.	Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
				f.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
				g.	Pelaksanaan penugasan urusan/kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa
				h.	Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat,	1.	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta	a.	Fasilitasi penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan

	dan Masyarakat Hukum Adat		pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota		desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
				b.	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
				c.	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
				d.	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
				e.	Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

Sesuai dengan RKPD Kabupaten Batang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang merencanakan total kebutuhan dana sebesar Rp **27.025.508.405** , - (Empat Puluh Milyard Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Putuh Delapan Ribu Seratus EnamPuluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rincian RKPD Final Dispermades Kab. Batang
Tahun Anggaran 2025

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran
1.	Belanja Urusan Non Bidang	3.333.829.042,00
2.	Belanja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23.691.679.363,00
	Total Pagu Anggaran	27.025.508.405,00

Sedangkan rumusan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah penetapan tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2025 Dispermades

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3.3
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dispermades Kabupaten Batang
Tahun Anggaran 2025

Kode	Unit / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Indikator		PAGU INDIKATIF				Asal Usulan
				APBD	APBD Prov	APBN	Sub Total	
1	2	3		4	5	6	7 = 4+5+6	8
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			27.025.508.405,00			27.025.508.405	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BEERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			27.025.508.405,00	0.00	0.00	27.025.508.405,00	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			27.025.508.405,00	0.00	0.00	27.025.508.405,00	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan cepat	12.0 bulan	3.333.829.042,00	0.00	0,00	3.333.829.042,00	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	5 Laporan	14.994.000,00	0.00	0.00	14.994.000,00	Usulan OPD
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Evaluasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	5 Laporan	14.994.000,00,	0.00	0.00	14.994.000,00	Usulan OPD
2.13.01.2.02 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22 Org/ bulan	2.961.821.435,00	0.00	0.00	2.961.821.435,00	Usulan OPD
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Org/ Bln	2.888.459.885,00	0.00	0.00	2.888.459.885,00	Usulan OPD
2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.Dok	73.361.550,00	0.00	0.00	73.361.550,00	Usulan OPD
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	22 Org	25.000.000,00	0.00	0.00	25.000.000,00	Usulan OPD
2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Org	25.000.000.00	0.00	0.00	25.000.000.00	Usulan OPD
					45			

2032.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran		103.043.407,00	0.00	0.00	103.043.407,00	Usulan OPD
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.124.700,00	0.00	0.00	2.124.700,00	Usulan OPD
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	29.842.307,00			29.842.307,00	
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12. Paket	7.984.000,00	0.00	0.00	7.984.000,00	Usulan OPD
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.492.400,00	0.00	0.00	9.492.400,00	Usulan OPD
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.600.000,00	0.00	0.00	3.600.000,00	Usulan OPD
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	50.000.000,00	0.00	0.00	50.000.000,00	Usulan OPD
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan operasional kantor	12 bulan	133.970.200,00	0.00	0.00	133.970.200,00	Usulan OPD
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	2.000.000,00	0.00	0.00	2.000.000,00	Usulan OPD
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka	12 Laporan	49.800.000,00	0.00	0.00	49.800.000,00	Usulan OPD
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82.170.200,00	0.00	0.00	82.170.200,00	Usulan OPD
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	24 Unit	95.000.000,00	0.00	0.00	95.000.000,00	Usulan OPD
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	65.000.000,00	0.00	0.00	65.000.000,00	Usulan OPD
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	5.000.000,00	0.00	0.00	5.000.000,00	Usulan OPD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan	3 Unit	25.000.000,00			25.000.000,00	
2.13.02	PROGRAM PENATAN DESA	Persentase budaya desa yang dilestarikan	%	35.000.000,00	0.00	0.00	35.000.000,00	Usulan OPD
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	jumlah adat dan budaya desa yang dibina	15	35.000.000,00	0.00	0.00	35.000.000,00	Usulan OPD

2.13.02.2.01.0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa AdatKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Laporan	35.000.000,00	0.00	0.00	35.000.000,00	Usulan OPD
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	persentase desa yang tertib adminis trasi sesuai peraturan yang berlaku		20.309.592.800,00	0.00	0.00	20.309.592.800,00	Usulan OPD
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Admiinistrasi Pemerintah Desa	jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya	239 desa	20.309.592.800,00	0.00	0.00	20.309.592.800,00	Usulan OPD
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	239 dokum en	65.000.000,00	0.00	0.00	65.000.000,00	Usulan OPD
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	239 Dokum en	3.486.584.800,00	0.00	0.00	3.486.584.800,00	Usulan OPD
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan Dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Des	15 Dokume n	50.000.000,00	0.00	0.00	50.000.000,00	Usulan OPD
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	204 Lapora n	40.000.000,00	0.00	0.00	40.000.000,00	Usulan OPD
2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Des	200 laporan	35.000.000,00	0.00	0.00	35.000.000,00	Usulan OPD
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Aset Desa	239 Dokumen	25.000.000,00	0.00	0.00	25.000.000,00	Usulan OPD
2.13.04.2.01.0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa.	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	239 Dokumen	16.558.008.000,00	0.00	0.00	16.558.008.000,00	Usulan OPD
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	6 Dokum en	50.000.000,00	0.00	0.00	50.000.000,00	Usulan OPD
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA		25 desa	3.347.086.563,00	0.00	0.00	3.347.086.563,00	Usulan OPD
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten Kota sera Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKD yang aktif dalam pemberdayaan desa	239 Dokum en	3.347.086.563,00	0.00	0.00	3.347.086.563,00	Usulan OPD

2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayaagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan RT,RW,PKK,Posyandu,LPK dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	239 Dokumen	580.815.113,00	0.00	0.00	580.815.113,00	Usulan OPD
2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Dokumen	149.999.900,00			149.999.900,00	Usulan OPD
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan UKM dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	4 Dokumen	2.095.000.000,00	0.00	0.00	2.095.000.000,00	Usulan OPD
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	239 Laporan	121.271.500,00	0.00	0.00	121.271.500,00	Usulan OPD
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat & Kesejahteraan Keluarga	239 Dokumen	400.000.050,00	0.00	0.00	400.000.050,00	Usulan OPD
TOTAL PAGU INDIKATIF				27.025.508.405,00	0,00	0,00	27.025.508.405,00	

Dari table 3.3 (T-C. 33) diatas dapat diuraikan hal hal sebagai berikut :

1. Rumusan nomenklatur dan jenis program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 sesuai dengan rancangan awal RKPD.
2. Terdapat perubahan pagu indikatif dibandingkan dengan pagu APBD Tahun 2024 dari beberapa sub kegiatan, hal ini menyesuaikan dengan evaluasi pelaksanaan sub kegiatan tahun sebelumnya dan perhitungan ulang perencanaan sehingga deiharapkan lebih efektif dan efesiens sesuai kebutuhan
3. pencapaian target kinerja

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPERMADES

:

Program dan kegiatan Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2025 telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dispermades Kabupaten Batang, Renstra Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Rencana Kerja dan Pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku. program/kegiatan Pada tahun 2025, jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif Dispermades Kabupaten Batang adalah sebesar Rp. 27.025.508.405,00 ,- yang tersusun dalam 4 Program, 9 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang
Tahun 2025
Nama Perangkat Daerah : DISPERMADES

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian kinerja dan Rencana Pendanaan				Nasional	Prioritas Daerah	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			27.025.508.405,00							31.521.000.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			27.025.508.405,00							31.521.000.000,00
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			27.025.508.405,00							31.521.000.000,00
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.333.829.042,00							3.416.000.000,00
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.994.000,00							5.500.000,00
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	14.994.000,00	Kab. Batang, Batang, Kauman	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM					5.500.000,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.961.821.435,00							2.967.000.000,00
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.888.459.885,00	Kab. Batang, Batang,	DANA TRANSFER UMUM-					2.967.000.000,00

									Kauman	DANA ALOKASI UMUM						
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	73.361.550,00	Kab. Batang, Batang, Kauman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						67.000.000,00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25.000.000,00								30.000.000,00
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	25.000.000,00	Kab. Batang, Batang, Kauman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						30.000.000,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah			103.043.407,00								155.500.000,00
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.124.700,00	Kab. Batang, Batang, Kauman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						3.500.000,00
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	29.842.307,00	Kab. Batang, Batang, Kauman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						60.000.000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.984.000,00	Kab. Batang, Batang, Kauman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						11.000.000,00

					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.492.400,00	Kab. Batang, Batang, Kauman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				11.000.000,00
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Batang, Batang, Kauman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				65.000.000,00
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				142.500.000,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			133.970.200,00						
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	2.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				2.500.000,00
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49.800.000,00	Kab. Batang, Batang, Kauman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				55.000.000,00
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82.170.200,00	Kab. Batang, Batang, Kauman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				85.000.000,00

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95.000.000,00							115.500.000,00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	65.000.000,00	Kab. Batang, Batang, Kauman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				75.000.000,00
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	5.000.000,00	Kab. Batang, Batang, Kauman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				5.500.000,00
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	25.000.000,00	Kab. Batang, Batang, Kauman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				35.000.000,00
					PROGRAM PENATAAN DESA		35.000.000,00							40.000.000,00
					Penyelenggaraan Penataan Desa		35.000.000,00							40.000.000,00
					Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota									
						Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Laporan	35.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				40.000.000,00
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		20.309.592.800,00							24.740.000.000,00
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		20.309.592.800,00							24.740.000.000,00
					Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa									

					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	239 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					70.000.000,00
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa									
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	239 Dokumen	3.486.584.800,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.495.000.000,00
					Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa									
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	15 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					40.000.000,00
					Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa									
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	204 Laporan	40.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kec, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					40.000.000,00
					Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa									
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	200 Laporan	35.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					40.000.000,00
					Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa									
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	239 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI					25.000.000,00

									Kel/Desa	UMUM						
					Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa											
						Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	239 Dokumen	16.558.008.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						21.000.000.000,00
					Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan											
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	6 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						30.000.000,00
					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			3.347.086.563,00								3.325.000.000,00
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.347.086.563,00								3.325.000.000,00
					Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat											
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasya rakatan Desa/ Kel. (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kel. dan Masyarakat Hukum Adat	239 Dokumen	580.815.113,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						570.000.000,00

					Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel. (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	239 Unit	149.999.900,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					160.000.000,00
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa									
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4 Dokumen	2.095.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.975.000.000,00
					Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna									
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	239 Laporan	121.271.500,00	Kab. Batang, Semua Kec, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					120.000.000,00
					Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga									
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	239 Dokumen	400.000.050,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					500.000.000,00
					TOTAL									31.521.000.000,00

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- c. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 25.

Berdasarkan analisa program dan kebutuhan anggaran, Rencana Kerja (Renja) Dispermades Kabupaten Batang tahun 2025 membutuhkan anggaran sebesar Rp. 30.334.140.905 yang terinci dalam 4 Program, 9 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Harapannya, Rencana Kerja (Renja) ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang tahun 2023-2026 dan sejalan dengan arah implementasi program unggulan Gubernur Jawa Tengah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi dan memperkuat sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparan, dan terintegrasi.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Batang, Juli 2025

Kepala Dispermades
Kabupaten Batang,



Drs. RUSMANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730720 199303 1 005

